



**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
LEMBAR DISPOSISI**

No. Agenda : 2516 ✓ Tgl. Masuk : 12/1/2014
No. Surat : 0317/M.PPN/11/2014 Tgl. Surat : 25 November 2014
Dari : Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Ka..BPPN A/F/T *) : A
Isi ringkas : Penyampaian Rancangan Awal RPJM 2015-2019
Lampiran :

Sifat : Sangat Rahasia Biasa Rahasia
Klasifikasi : Kilat Segera Sangat segera Biasa

Disposisi Kepada :

Sekretariat Utama Dep. Keuangan Daerah Inspektorat
 Dep. Perekonomian Dep. Akuntan Negara Kapuslitbangwas
 Dep. Polsoskam Dep. Investigasi Kapusdiklatwas
 Perw. *Selektif* Kapusbin JFA
 Kapusinfowas

Petunjuk :

Setuju Sesuai catatan Dampingi
 Tolak Untuk perhatian Bicarakan dng. Saya
 Jawab Untuk diketahui Ingatkan
 Teliti dan pendapat Edarkan Agendakan
 Selesaikan Siapkan Bahan Simpan
 Koordinasi/ monitor Harap hadir/ wakili . CopyX, Asli

CATATAN : Selektif
*Selektif untuk kerja timbale soft copy ke
penerjemah bahan kajian Perencanaan RPJM
2015-2019*



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional /
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

Nomor : 0317 /M.PPN/11/2014
Lampiran : 3 (tiga) dokumen
Perihal : Penyampaian Rancangan Awal
RPJMN 2015-2019

Jakarta, 25 November 2014

Kepada Yth.

1. Para Menteri Kabinet Kerja
2. Jaksa Agung
3. Kepala Kepolisian RI
4. Para Kepala Lembaga Pemerintahan Non Kementerian
5. Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara di Jakarta

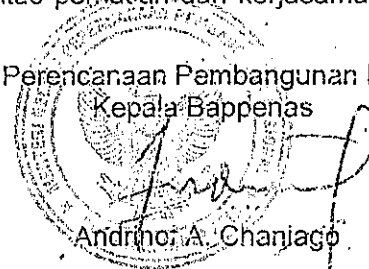
Melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 dan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) Tahun 2015-2019, terlampir disampaikan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 yang telah memuat visi, misi dan program prioritas Presiden.

Rancangan Awal RPJMN Tahun 2015-2019 tersebut agar dijadikan pedoman Kementerian/Lembaga dalam menyusun Rancangan Renstra K/L 2015-2019. Rancangan Renstra K/L 2015-2019 yang disusun, ditelaah oleh Kementerian PPN/Bappenas bersama-sama dengan Kementerian/Lembaga pada tanggal 27 November 2014 sampai dengan 12 Desember 2014.

Penelaahan dilakukan terkait dengan batasan muatan Rancangan Renstra K/L 2015-2019 dan konsistensi Rancangan Renstra K/L 2015-2019 dengan Rancangan Awal RPJMN 2015-2019. Hasil penelaahan tersebut akan digunakan sebagai bahan penyempurnaan Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 menjadi Rancangan RPJMN 2015-2019. Rancangan RPJMN 2015-2019 juga menjadi bahan bagi Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Jangka Menengah.

Demikian untuk dapat dilaksanakan. Atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terimakasih.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Bappenas



Andriwo A. Chanjago

Tembusan Yth.:

1. Presiden Republik Indonesia (sebagai laporan)
2. Wakil Presiden Republik Indonesia (sebagai laporan)

Lampiran Surat

Nomor : 0317/MPPN/11/2014

Tanggal : 25 November 2014

Daftar Penerima Surat

1. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
2. Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
4. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
5. Ketua Mahkamah Agung
6. Ketua Mahkamah Konstitusi
7. Ketua Komisi Yudisial RI (KY)
8. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
9. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
10. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman
11. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
12. Menteri Dalam Negeri
13. Menteri Luar Negeri
14. Menteri Pertahanan
15. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
16. Menteri Keuangan
17. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
18. Menteri Perindustrian
19. Menteri Perdagangan
20. Menteri Pertanian
21. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
22. Menteri Perhubungan
23. Menteri Kelautan dan Perikanan
24. Menteri Ketenagakerjaan
25. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
26. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
27. Menteri Kesehatan
28. Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menengah
29. Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
30. Menteri Sosial
31. Menteri Agama
32. Menteri Pariwisata
33. Menteri Komunikasi dan Informatika
34. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
35. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
36. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
37. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
38. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
39. Menteri Badan Usaha Milik Negara
40. Menteri Pemuda dan Olahraga
41. Menteri Sekretaris Negara
42. Sekretaris Kabinet
43. Jaksa Agung Republik Indonesia
44. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
45. Kepala Badan Intelijen Negara (BIN)
46. Kepala Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg)
47. Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional (Wantanas)
48. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS)

49. Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas)
50. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)
51. Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas)
52. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
53. Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN)
54. Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)
55. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG)
56. Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
57. Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)
58. Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batn)
59. Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)
60. Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa (Lapan)
61. Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG)
62. Kepala Badan Standardisasi Nasional (BSN)
63. Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten)
64. Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN)
65. Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)
66. Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN)
67. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
68. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
69. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)
70. Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI)
71. Ketua Ombudsman Republik Indonesia
72. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)
73. Kepala Badan SAR Nasional (Basarnas)
74. Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP)
75. Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)
76. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)
77. Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)
78. Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU)
79. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
80. Kepala Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS)
81. Kepala Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS)
82. Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
83. Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang
84. Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia
85. Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia